

**Judul** : Gaji PPPK Guru & Tenaga Medis diusulkan ditanggung APBN  
**Tanggal** : Minggu, 14 Juni 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Gaji PPPK Guru & Tenaga Medis Diusulkan Ditanggung APBN

Pemerintah Daerah merasa terbebani dengan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu. Untuk mengatasi masalah ini, Ketua Komisi II DPR Rifiqinazmy Karsayuda mengusulkan agar gaji PPPK, khususnya untuk guru dan tenaga medis, ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rifiqinazmy mengatakan, jika gaji PPPK ditanggung Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah tidak

terlalu terbebani. "Penggajian PPPK dan PPPK paruh waktu, khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah, dibiayai dari APBN," ucap Rifiqinazmy, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026). Dia yakin, kebijakan itu akan mengurangi beban Pemerintah Daerah. Anggaran daerah pun bisa dimaksimalkan untuk pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, gaji PPPK penuh waktu dan paruh waktu

dibebankan kepada APBD. Alhasil, anggaran belanja pegawai meningkat. "Karena itu, persentase belanja pegawai juga meningkat," ujar dia. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, Pemerintah Pusat harus membantu Pemerintah Daerah yang mengalami kesulitan anggaran belanja pegawai, terutama untuk penggajian PPPK. "Pemerintah Pusat harus ikut membantu. Karena memang ini

sangat terkait dengan kesehatan fiskal daerah dan pada saat yang sama teman-teman PPPK wajib mendapatkan haknya," ucap Mardani, saat dihubungi Rakyat Merdeka, Jumat (12/6/2026). Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia berpandangan, tidak masalah jika penggajian PPPK dialihkan ke APBN. Namun, dia mengingatkan bahwa kebijakan ini hanya digunakan untuk jangka pendek. "Untuk jangka menengah

dan panjang, Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang tanggal waktunya sudah lewat hampir tiga tahun," ujar Doli, kepada Rakyat Merdeka, Jumat (12/6/2026). Untuk mengetahui pandangan Mardani Ali Sera dan Ahmad Doli Kurnia mengenai polemik anggaran gaji PPPK di tingkat daerah, berikut wawancaranya.

**AHMAD DOLI KURNIA**, Anggota Komisi II DPR

### Untuk Jangka Pendek Boleh Pakai APBN



“

Apabila Pemerintah Daerah mengalami kesulitan fiskal dalam belanja pegawai, sebaiknya memang diambil alih oleh APBN sebagai solusi jangka pendek.

Bagaimana pandangan Anda mengenai polemik anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tingkat daerah?

Pertama, yang paling penting adalah bahwa kita semua, khususnya Pemerintah, harus memberikan perhatian serius terhadap keberadaan Bapak dan Ibu PPPK. Mereka yang selama ini disebut sebagai tenaga honorer sudah belasan, bahkan ada yang puluhan tahun, mengabdikan diri untuk melayani masyarakat.

Bagaimana dengan usulan khusus agar gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan dibayar melalui APBN?

Nah, apalagi di bidang pendidikan dan kesehatan. Sudah jutaan murid yang mereka didik serta masyarakat yang selamat dan sehat karena dedikasi mereka.

Lalu bagaimana pembahasannya? Kami di DPR, khususnya Komisi II DPR, sejak periode lalu berupaya memperjuangkan keberadaan dan nasib mereka. Dalam hasil revisi Undang-Undang ASN pada tahun 2023, mereka diangkat menjadi ASN dan ditempatkan dalam kategori PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Saat ini, banyak Pemerintah Daerah yang memiliki keterbatasan

anggaran untuk gaji PPPK. Apa yang seharusnya dilakukan?

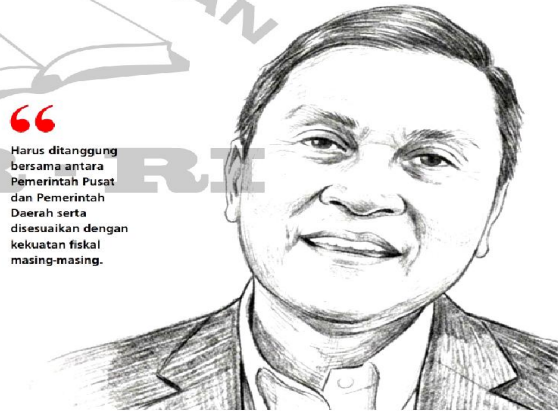
Dalam kaitan itulah, saya termasuk yang tidak setuju apabila, dalam situasi dan kondisi apa pun, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengorbankan mereka. Menurut saya, dalam situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, tidak boleh ada PHK terhadap mereka.

Ada usulan agar anggaran gaji PPPK dialihkan ke APBN. Apa tanggapan Anda?

Saya mendukung apabila Pemerintah Daerah mengalami kesulitan fiskal dalam belanja pegawai. Sebaiknya memang diambil alih oleh APBN sebagai solusi jangka pendek. ■ NNM

**MARDANI ALI SERA**, Wakil Ketua Komisi II DPR

### Pemerintah Pusat Harus Ikut Bantu



“

Harus ditanggung bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta disesuaikan dengan kekuatan fiskal masing-masing.

Bagaimana pandangan Anda mengenai polemik anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tingkat daerah?

Polemik akan selesai, jika masalah PPPK tidak hanya menjadi beban teman-teman di daerah.

Seharusnya bagaimana?

Ya, harus ditanggung bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta disesuaikan dengan kekuatan fiskal masing-masing. Bagi daerah yang fiskalnya kuat tidak ada masalah, namun bagi yang fiskalnya lemah harus dibantu.

Bagaimana dengan opsi pengurangan PPPK bagi daerah yang

kesulitan keuangan?

Teman-teman PPPK penuh waktu dan paruh waktu semuanya sudah melalui proses audit berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebelum diangkat, semuanya harus diaudit terlebih dahulu. Mereka mayoritas sudah memiliki tapuksi yang jelas. Jadi, hak-haknya harus dijaga karena kewajibannya sudah dipenuhi oleh PPPK ini.

Jadi solusinya, Pemerintah Pusat ikut membantu memanganai masalah anggaran gaji PPPK?

Pemerintah Pusat harus ikut membantu, karena memang ini sangat terkait dengan kesehatan fiskal daerah. Pada saat yang sama, teman-teman PPPK wajib mendapatkan haknya.

Kami berharap Pemerintah Pusat ikut bertanggung jawab, termasuk dalam persoalan PPPK.

Bagaimana dengan usulan gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan dialihkan ke APBN? Guru sebaiknya tidak berstatus PPPK.

Maksudnya bagaimana?

Guru adalah profesi yang betul-betul sangat fundamental. Jadi, secara umum Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Karena itu, ekonomi kita harus maju. Pemerintah memiliki cadangan anggaran, gaji dibayarkan dengan lancar, dan pada saat yang sama masyarakat sejahtera. ■ NNM